

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penulisan hukum diatas, penulis menyimpulkan bahwa perlindungan korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah mengatur lebih rinci terkait perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual. Secara substansi, Undang-Undang tersebut telah menjelaskan antara lain pengertian perlindungan korban kekerasan seksual, hak korban, jenis-jenis kekerasan seksual, pelaporan, pendampingan korban dan restitusi korban pelecehan seksual, Dimana hal-hal tersebut belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Substansi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini perlu dijadikan rujukan utama bagi penegak hukum, khususnya kepolisian republic Indonesia. Dalam praktiknya, Aparat Penegak Hukum cenderung belum memahami isi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kecenderungannya, Aparat Hukum akan menggunakan UU Perlindungan Anak pada korban dibawah umur. Sedangkan untuk korban kekerasan seksual yang bersia dewasa, kecenderungannya kurang mendapat perhatian. Hal ini disebabkan karena aparat hukum masih memiliki paradigma bahwa terjadinya kekerasan seksual pada orang yang berusia dewasa merupakan hubungan yang didasari oleh konsensual yang tidak masuk dalam ranah public. Akibatnya, hal ini menyulitkan korban dewasa. Proses pelaporan tidak berjalan dengan baik sehingga tidak dapat dilanjutkan. Selain itu, masih banyak Masyarakat yang belum paham keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Banyak korban yang

melakukan pelaporan tanpa didampingi oleh Lembaga Masyarakat seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pemerintah seyogyanya melakukan upaya atau rencana aksi lebih lanjut terkait dengan Pelindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual dengan membentuk peraturan turunan dari UU TPKS. Namun, hingga saat ini peraturan tersebut belum juga dibentuk dan masih dalam tahap perumusan. Ketiadaan peraturan pelaksana ini berpengaruh pada proses pelindungan hukum pada korban pelecehan seksual karena banyak Aparat Penegak Hukum yang menolak menggunakan Undang-Undang ini dengan alasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum memiliki peraturan turunan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penulisan hukum diatas, maka saran yang dapat penulis berikan saran sebagai berikut:

1. Penyuluhan serta sosialisasi yang menyeluruh untuk Aparat Penegak Hukum urgent untuk dilakukan secara rutin dan masif agar Aparat Penegak Hukum dapat memproses kasus kekerasan seksual dengan baik dan hak korban dapat terlindungi dengan baik dan maksimal sebagaimana diatur dalam UU TPKS. Penyuluhan dan Sosialisasi yang menyeluruh untuk Masyarakat juga urgent untuk segera dilakukan secara rutin dan masif agar mencegah kekerasan seksual terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan Masyarakat dapat memahami hak-hak korban dan pelindungan korban kekerasan seksual.

2. Mempercepat proses penyusunan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan seyogyanya pemerintah juga berupaya aktif untuk menyusun dan mengimplementasikan program-program kerja untuk mewujudkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.



3. Daftar Pustaka

Buku

- Chaznawi, A. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana I*. PT Raja Grafindo.
- Gadafi, M., Hos, H., & Amin, H. (2019). *Bersinergi dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak untuk Mencegah Kekerasan Seksual Anak*. kendari: Literacy Institute.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hendrojo. (2006). *Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*. Yogyakarta: Grafindo Persada.
- Jimly, A., & Safa'at, A. (2012). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konpres.
- Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Manuputty, S. H. (2023). Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil. 2.
- Marpaung, L. (2012). *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljanto. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Citra.
- Muda, A. A. (2006). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Reality Publisher.
- Nisa, K. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Kekerasan Seksual. 6.
- Puspa, Y. P. (1997). *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka.
- Putri, T. S. (2006). *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: UI Press.
- Qiyah, A. (2023). Kebijakan Restitusi Sebagai Pembayaran Ganti Kerugian Terhadap Korban Kekerasan Seksual Perspektif Maqasid Syariah.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ranoemihardja, R. A. (1997). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Tarsito.
- Sulaeman, M., & Homzah, S. (2010). *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Ulhaq, W. Z. (2022). Analisis Restorative Justice dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Progresif. 2.

Jurnal

- Bayusuta, B. B., & Suwanto, Y. (2022). Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. 1, 50-57.

- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *4*, 170-196.
- Putri, A. H. (2021). Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum*, vol.2, Halaman 61-72.
- Salamor, Y. B., & Salamor, A. M. (2022). Kekerasan Seksual terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India). 7-11.
- Wadjo, H. Z., Saimima, J. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif.. 12-16

Website:

- CATAHU 2023 Komnas Perempuan: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara Meningkat. (2022, Maret 8. Diakses dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* diakses dari Digital Ocean: <https://kbbi.web.id/perlindungan>
- Kemendikbud. (2022, November). *Apa itu kekerasan seksual?* Diakses dari Laman Kemendikbudrsitek: <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/#:~:text=Kekerasan%20Seksual%20a>
- Kemenpppa. (2023, Juni 15). *Percepatan Pembentukan Peraturan Turunan UU TPKS*. Di akses dari Laman Kemenpppa : <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4587/percepatan-pembentukan-peraturan-turunan-uu-tpks-kemenpppa-komitmen-rampungkan-tahun-ini>
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. (2016). *Arti Kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Diakses dari Typoonline: <https://typoonline.com/kbbi/perlindungan>
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. (2016). *Arti Kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBB Diakses dari Typoonline: https://typoonline.com/kbbi/prelindungan*
- Komnas Perempuan . (2018). *CATAHU 2018: Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017*. diakses

- dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan : <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2018-tergerusnya-ruang-aman-perempuan-dalam-pusaran-politik-populisme-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2017>
- Komnas Perempuan . (2019, Maret 9). *Korban Bersuara, Data Bicara: Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*. Diakses dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan: <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019>
- Komnas Perempuan . (2021). *Peningkatan Jumlah Kasus KBG di Tahun 2021 Menjadi Alarm Untuk RUU TPKS Segera Disahkan*. Diakses dari Catatan Tahunan Komisi Perempuan: <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>
- Komnas Perempuan. (2020). *CATAHU 2020: Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman Bagi perempuan dan anak perempuan. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*. Diakses dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan: <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>
- Komnas Perempuan. (2021, september 22). *CATAHU 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*. Diakses dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan: <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>
- Silaen, C. R. (2023, september 7). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*. Diakses dari Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kekerasan-seksual-lt64f9bb8c14728>
- Tim Hukum Online. (2022, September 30). *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. Diakses dari Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc>
- Santika, E. (2023, februari 3). *Kekerasan Seksual Jadi Jenis yang Paling Banyak Dialami Korban Sepanjang 2022*. Diakses dari Kata Data: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/03/kekerasan-seksual-jadi-jenis-yang-paling-banyak-dialami-korban-sepanjang-2022>
- YAPHI. (2023, Oktober 26). *Tantangan Implementasi UU TPKS Terkait Layanan Penanganan Kekerasan Perempuan Disabilitas*. Diakses dari Suara Keadilan: <https://www.suarakeadilan.org/publikasi/36-suara-keadilan/353-talkshow-knd-tantangan-implementasi-uu-tpks-terkait-layanan-penanganan-kekerasan-perempuan-disabilita>

Maulana, A. H. (2023, 2 13). *2023 Baru Satu Setengah Bulan, Sudah Ada 6 Kasus Kekerasan Seksual Anak di Jakarta dan Tangerang yang Terungkap*. Diakses dari Kompas: <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/02/13/08314181/2023-baru-satu-setengah-bulan-sudah-ada-6-kasus-kekerasan-seksual-anak-di?page=all>

Oktavira, B. A. (2023, July 13). *Pengertian Hukum dan Unsur-unsur Hukum*.diakses dari Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-hukum-dan-unsur-unsur-hukum-lt628c8643271d>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1945

Kitab Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)



Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5882)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6792)



4. Daftar Pustaka

Buku

- Chaznawi, A. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana I*. PT Raja Grafindo.
- Gadafi, M., Hos, H., & Amin, H. (2019). *Bersinergi dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak untuk Mencegah Kekerasan Seksual Anak*. kendari: Literacy Institute.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hendrojo. (2006). *Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*. Yogyakarta: Grafindo Persada.
- Jimly, A., & Safa'at, A. (2012). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konpres.
- Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Manuputty, S. H. (2023). Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil. 2.
- Marpaung, L. (2012). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljanto. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Citra.
- Muda, A. A. (2006). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Reality Publisher.
- Nisa, K. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Kekerasan Seksual. 6.
- Puspa, Y. P. (1997). *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka.
- Putri, T. S. (2006). *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: UI Press.
- Qiyah, A. (2023). Kebijakan Restitusi Sebagai Pembayaran Ganti Kerugian Terhadap Korban Kekerasan Seksual Perspektif Maqasid Syariah.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ranoemihardja, R. A. (1997). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Tarsito.
- Sulaeman, M., & Homzah, S. (2010). *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Ulhaq, W. Z. (2022). Analisis Restorative Justice dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Progresif. 2.

Jurnal

- Bayusuta, B. B., & Suwanto, Y. (2022). Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. 1, 50-57.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. 4, 170-196.

Putri, A. H. (2021). Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum*, vol.2, Halaman 61-72.

Salamor, Y. B., & Salamor, A. M. (2022). Kekerasan Seksual terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India). 7-11.

Wadjo, H. Z., Saimima, J. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif.. 12-16

Website:

CATAHU 2023 Komnas Perempuan: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara Meningkat. (2022, Maret 8. Diakses dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* diakses dari Digital Ocean: <https://kbbi.web.id/perlindungan>

Kemendikbud. (2022, November). *Apa itu kekerasan seksual?* Diakses dari Laman Kemendikbudrsitek: <https://merdekadarikekerasan.kemendikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/#:~:text=Kekerasan%20Seksual%20a>

Kemenpppa. (2023, Juni 15). *Percepatan Pembentukan Peraturan Turunan UU TPKS*. Di akses dari Laman Kemenpppa : <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4587/percepatan-pembentukan-peraturan-turunan-uu-tpks-kemenpppa-komitmen-rampungkan-tahun-ini>

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. (2016). *Arti Kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Diakses dari Typoonline: <https://typoonline.com/kbbi/pelindungan>

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. (2016). *Arti Kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBB Diakses dari Typoonline: https://typoonline.com/kbbi/prelindungan*

Komnas Perempuan . (2018). *CATAHU 2018: Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017*. diakses

- dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan : <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2018-tergerusnya-ruang-aman-perempuan-dalam-pusaran-politik-populisme-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2017>
- Komnas Perempuan . (2019, Maret 9). *Korban Bersuara, Data Bicara: Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*. Diakses dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan: <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019>
- Komnas Perempuan . (2021). *Peningkatan Jumlah Kasus KBG di Tahun 2021 Menjadi Alarm Untuk RUU TPKS Segera Disahkan*. Diakses dari Catatan Tahunan Komisi Perempuan: <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>
- Komnas Perempuan. (2020). *CATAHU 2020: Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman Bagi perempuan dan anak perempuan. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*. Diakses dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan: <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>
- Komnas Perempuan. (2021, september 22). *CATAHU 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*. Diakses dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan: <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>
- Silaen, C. R. (2023, september 7). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*. Diakses dari Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kekerasan-seksual-lt64f9bb8c14728>
- Tim Hukum Online. (2022, September 30). *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. Diakses dari Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc>
- Santika, E. (2023, februari 3). *Kekerasan Seksual Jadi Jenis yang Paling Banyak Dialami Korban Sepanjang 2022*. Diakses dari Kata Data: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/03/kekerasan-seksual-jadi-jenis-yang-paling-banyak-dialami-korban-sepanjang-2022>
- YAPHI. (2023, Oktober 26). *Tantangan Implementasi UU TPKS Terkait Layanan Penanganan Kekerasan Perempuan Disabilitas*. Diakses dari Suara Keadilan: <https://www.suarakeadilan.org/publikasi/36-suara-keadilan/353-talkshow-knd-tantangan-implementasi-uu-tpks-terkait-layanan-penanganan-kekerasan-perempuan-disabilita>

Maulana, A. H. (2023, 2 13). *2023 Baru Satu Setengah Bulan, Sudah Ada 6 Kasus Kekerasan Seksual Anak di Jakarta dan Tangerang yang Terungkap*. Diakses dari Kompas: <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/02/13/08314181/2023-baru-satu-setengah-bulan-sudah-ada-6-kasus-kekerasan-seksual-anak-di?page=all>

Oktavira, B. A. (2023, July 13). *Pengertian Hukum dan Unsur-unsur Hukum*.diakses dari Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-hukum-dan-unsur-unsur-hukum-lt628c8643271d>



Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5882)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6792)